

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya manusia menjadi salah satu indikator terpenting dalam menjalankan segala aktivitas yang menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan dari suatu organisasi ditentukan pula oleh kualitas dari masing-masing sumber daya manusia yang ada didalam organisasi. Sehingga untuk meningkatkan kinerja yang baik dalam organisasi perlu memperhatikan karyawan-karyawan pada organisasi tersebut (Simamora, 2006). Suatu organisasi akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kinerja pegawai dengan harapan semua tujuan-tujuan dari organisasi yang telah disusun akan tercapai dengan tepat sasaran.

Organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diharuskan untuk memiliki kinerja yang berorientasi untuk kepentingan publik agar tujuan pemerintah dapat tercapai. Kinerja manajerial SKPD dapat dilihat dari keberhasilan manajer dalam melaksanakan dan menjalankan program, kegiatan atau kebijakan guna mencapai tujuan pemerintah. Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh organisasi dalam pelaksanaan kegiatan bertujuan dapat mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi (Sujarweni, 2015). Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staff serta negosiasi.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja, pemerintah daerah diharuskan menyusun LAKIP. Dalam laporan kinerja yang disusun oleh setiap SKPD akan menyajikan beberapa

informasi terkait yaitu uraian singkat tentang organisasi, rencana maupun target kinerja, pengukuran kinerja maupun evaluasi dan analisis kinerja untuk masing-masing kegiatan yang telah terlaksanakan. Adapun fenomena yang terjadi berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yakni buruknya kinerja aparatur Pemkab Magelang. Yang dapat dilihat berdasarkan laporan hasil evaluasi LAKIP yang diperoleh Pemkab Magelang. Nilai AKIP yang memperlihatkan hasil Kinerja Pemkab Magelang lima tahun berturut-turut memperoleh skor CC atau cukup yang artinya indikator-indikator dalam penilaian masih banyak yang belum terpenuhi secara optimal. Salah satu indikator yaitu tidak maksimalnya pembangunan daerah, ini bisa dilihat dari serapan anggaran yang belum memuaskan serta masih terdapat banyak kegiatan yang belum terealisasi. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, kinerja Pemkab Magelang mengalami peningkatan sebesar 0,23 point dan untuk tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan.

Suatu keberhasilan kinerja organisasi sektor publik juga dapat dikatakan berhasil atau tidaknya ketika organisasi tersebut dapat menjalankan dan memenuhi semua kebutuhan dan amanah masyarakat. Untuk terciptanya kinerja pemerintahan yang baik (*good goverance government*), pemerintah terus melakukan upaya perbaikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)

Menurut ayat di atas, setiap manusia harus melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, memperhatikan apa yang telah dilakukan karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan begitu maka pemerintah harus melakukan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin dan bekerja dengan sebaik-baiknya.

Kinerja aparat atau kinerja manajerial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja sektor publik. Menurut Wilson (2012) bahwa kinerja dapat mengacu pada jumlah dan juga kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Putri (2010) kinerja manajerial didefinisikan sebagai kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, kepegawaian, negosiasi, representasi, dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial menunjukkan kapasitas dan keberhasilan seorang manajer dalam memimpin organisasi untuk memenuhi tujuan yang mengarah pada penyediaan layanan publik. Keharusan kinerja manajerial diperlukan untuk menentukan sejauh mana suatu lembaga atau organisasi dapat menjalankan visi dan misinya dalam rangka memberikan pelayanan publik. Salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas di pemerintah daerah yaitu kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hal itu karena tata pemerintah yang baik dapat terbentuk akibat kinerjanya juga baik. Evaluasi kinerja manajerial SKPD sangat penting karena dapat membantu organisasi sektor publik dalam membuat kebijakan dan juga keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuannya (Amertadewi, 2013). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pada suatu kinerja manajerial, salah satu faktor tersebut yaitu akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik merupakan tanggungjawab wali (agent) untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan juga aktivitas yang menjadi kewajibannya kepada wali pemberi amanah yang mempunyai hak dan

kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Adanya akuntabilitas publik mampu mendongkrak kinerja manajerial karena makin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan, maka akan makin baik pula kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Darmawan, *et. al.*, 2016). Dengan demikian, manajer akan berusaha dan bertanggungjawab untuk selalu meningkatkan kinerja manajerialnya.

Kejelasan sasaran anggaran juga merupakan salah satu faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Menurut Kenis (1979) dalam Putra (2013) kejelasan sasaran anggaran yaitu sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran yang bisa dipahami oleh karyawan yang bertanggung jawab untuk memenuhi sasaran anggaran. Tugas utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja ditunjukkan dengan sasaran dan tujuan anggaran yang jelas dalam organisasi (Anderson, 2016). Penyusunan rencana kerja pemerintah dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dipermudah dengan adanya kejelasan sasaran anggaran pada organisasi sektor publik. Selain kejelasan sasaran anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial.

Dengan adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dan tingkat menengah dalam proses penyusunan anggaran maka partisipasi anggaran dapat memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja manajerial di pemerintah. Maka dari itu, manajer di tingkat menengah dan bawah akan berusaha untuk meningkatkan kinerja manajerial mereka dengan mempunyai lebih banyak tanggung jawab sehingga tujuan penganggaran dapat segera terpenuhi. Menurut Sari *et. al.*, (2014) keterlibatan anggaran yang lebih baik di pemerintah mengarah pada peningkatan kinerja manajemen di pemerintah daerah.

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Semakin berkomitmen seorang karyawan terhadap perusahaan mereka, maka semakin banyak pula upaya yang mereka berikan untuk kepentingan perusahaan. Menurut Chong & Chong (2002) komitmen organisasi juga digunakan sebagai alat bantu psikologis untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Komitmen organisasi mengacu pada kesediaan karyawan untuk memihak dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingannya sendiri. Komitmen organisasi dalam pemerintahan akan mendorong tanggungjawab manajer dalam mencapai tujuan pemerintah. Menurut Putri (2013) komitmen organisasi yang tinggi dapat memotivasi individu untuk bekerja agar dapat menuju peningkatan kinerja organisasi dan juga pencapaian tujuan organisasi.

Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Darmawan, *et. al.*, (2016), Efrizar (2017), Putra (2013). Sedangkan penelitian Candrakusuma (2017) menerangkan bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya penelitian Candrakusuma (2017), Anderson (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Sedangkan menurut Amril (2014) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah. Menurut penelitian Hidrayadi, *et. al.*, (2015) menerangkan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Namun berbeda dengan penelitian Candrakusuma (2017) yang menerangkan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selain itu penelitian Putri (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Mursyid (2011) menyatakan tidak ada hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja manajerial di Kabupaten Bogor.

Pada dasarnya penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Melia & Sari (2019) “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)” dengan menambah variabel independen yaitu komitmen organisasi. Obyek penelitian yang dilaksanakan berbeda dengan penelitian Melia & Sari (2019), penelitian ini akan dilaksanakan di SKPD kabupaten Magelang, sedangkan penelitian Melia & Sari (2019) dilakukan pada SKPD Daerah Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian ini berbeda dengan penelitian Melia & Sari (2019), penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021, sedangkan penelitian Melia & Sari (2019) dilaksanakan pada tahun 2019.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Magelang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial

#### **D. Manfaat**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan juga referensi bagi para akademik yang melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai acuan dan juga dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi pemerintah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan untuk pemerintah dalam pengambilan keputusan serta sebagai bahan evaluasi, khususnya untuk bidang sektor publik yang terkait dengan kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Magelang.

###### **b. Bagi masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah, khususnya pada SKPD Kabupaten Magelang.

###### **c. Bagi perguruan tinggi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti empiris dan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kinerja manajerial.